

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2019)

Tedo Arsa Nanditama, Moch. Didik Ardiyanto¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of good corporate governance consisting of executive character, firm size, leverage, liquidity, institutional ownership, managerial ownership, independent board of commissioners, board of directors, audit committee, audit committee meeting, and audit quality on measured tax avoidance. with ETR.

The population in this study consisted of all manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2018-2019 period. Sampling was done by using purposive a sampling method. The total sample of this research is 103 companies. To test the hypothesis, this study uses multiple regression analysis.

The results of this study indicate that firm size, institutional ownership and managerial ownership have a significant positive effect on tax avoidance. In addition, leverage and audit quality have a significant negative effect on tax avoidance. As for the character of the executive, liquidity, independent board of commissioners, board of directors, audit committee and audit committee meetings have no significant effect on tax avoidance.

Keywords: Good Corporate Governance, Tax Avoidance, Effective Tax Rate.

PENDAHULUAN

Untuk mendorong finansial beserta melaksanakan pengembangan negara, setiap negara memerlukan modal dalam jumlah yang cukup banyak. Karena diperlukannya modal dalam jumlah yang cukup banyak, hampir seluruh negara di dunia mengenakan tarif pajak pada rakyatnya. Mengacu pada Allingham dan sandmo dalam (Simanjutak & Mukhlis, 2012), wajib pajak sebenarnya tidak berkehendak untuk melakukan pembayar pajak, namun wajib pajak tidak memiliki opsi selain menaati aturan tersebut.

Pada artikel yang diterbitkan di *website* resmi kemenkeu.go.id penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2018 dan 2019 belum memenuhi target yang ditetapkan pada APBN. Selain itu, pada artikel yang diterbitkan CNN Indonesia pada hari rabu, 12-02-2020 juga menjelaskan bahwa adanya penurunan tax ratio yang sebelumnya pada 2018 sebesar 11,5% sedangkan pada 2019 tax rasionya sebesar 10,7%. Hal ini mengartikan bahwa pemungutan pajak di Indonesia belum maksimal. Dikarenakan hal tersebut, pemerintah selalu mencari cara untuk meningkatkan peluang pajak yang masuk ke dalam kas negara untuk memenuhi kebutuhan finansial serta infrastruktur Indonesia. Namun permasalahan tersebut berlawanan akan persepsi korporasi, yang mana ketika jumlah total pajak yang wajib dibayarkan mengalami peningkatan, hal tersebut akan memotong jumlah pendapatan. Tingginya nominal yang perlu dibayarkan oleh korporasi menjadikan mereka melaksanakan penghindaran pajak sehingga pembayaran pajak yang dilakukan menjadi lebih efisien. Kasus ini sesuai dengan artikel yang diterbitkan nasional.kontan.co.id pada tanggal 8-5-2019 yang menyatakan bahwa adanya laporan dari lembaga *tax justice network* tentang tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tembakau milik *british amerikan tobacco* melalui PT bentoel internasional investama dengan cara melakukan utang pada perusahaan afiliasi guna pembayaran peralatan, sehingga pembayaran bunga yang dibayarkan akan mengurangi beban

¹ *Corresponding author*

pajak perusahaan tersebut. Aktifitas seperti penghindaran pajak ini dapat menyebabkan berkurangnya pemasukan negara.

Terdapat dua metode dalam melaksanakan penghindaran pajak, yakni penghindaran pajak legal serta penghindaran pajak ilegal (Fadhilah, 2014). Penghindaran atas pajak legal biasa disebut *tax avoidance*, adapun penghindaran atas pajak ilegal sering disebut *tax evasion*. Yang menjadikan kedua cara ini berbeda adalah *tax avoidance* dilaksanakan dengan metode pemanfaatan celah (*loophole*) yang terdapat di ketentuan perpajakan suatu negara sehingga, hal ini dapat dianggap legal. Sedangkan untuk *tax evasion* dilakukan dengan cara melanggar ketentuan perpajakan suatu negara sehingga hal ini dianggap sebagai penghindaran pajak yang ilegal.

Masyarakat atau entitas sangat diharapkan oleh pemerintah dapat memiliki sifat kepatuhan yang tinggi terhadap pajak. Sikap tersebut ditunjukkan dengan cara pewajib pajak dapat senantiasa memenuhi tanggung jawab pajaknya berdasarkan dengan kondisi sebenarnya sehingga dapat memaksimalkan penerimaan negara. Sedangkan, rata-rata entitas yang menjadi wajib pajak memposisikan pajak selaku beban dan memiliki keinginan untuk mengoptimalkan pendapatan serta memenuhi kewajiban pajaknya seminimum mungkin tanpa melawan ketentuan yang ada dengan melaksanakan *tax avoidance*. Untuk bertujuan memberi kontrol atas kinerja pengelola entitas, termasuk pengendalian atas pajak entitas dibentuklah *corporate governance*. Dalam pengelolaan pajak, *corporate governance* sendiri meliputi tanggung jawab, kewajaran, transparansi, independensi, dan akuntabilitas (Winarsih et al., 2014).

Pada penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa adanya keterkaitan tertentu antara GCG (yang diwakilkan dengan karakter eksekutif, karakteristik perusahaan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit, rapat komite audit, dan kualitas audit) terhadap perilaku *tax avoidance* yang dijalankan korporat.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Penelitian ini menggunakan teori agensi. Teori agensi ialah hubungan kontraktual atas prinsipal dengan agen (Supriyono, 2018). Hubungan ini dipicu saat seorang pemberi kerja (prinsipal) memberi kerja kepada seseorang (agen) untuk menyediakan layanan serta delegasikan kekuasaan dalam menentukan keputusan (Jensen & Meckling, 1976). Smith (1776) mengemukakan jika seorang manajer perusahaan yang bukan pemilik resmi perusahaan tidak dapat diharapkan untuk bekerja dengan baik sesuai dengan tujuan pemiliknya. Diasumsikan bahwa prinsipal dan agen dimotivasi secara ekonomis (*rational economic person*) dan didorong oleh kepentingan mereka, tetapi mereka mungkin memiliki selera yang berbeda dalam preferensi, kepercayaan dan informasi.

Manajemen berharap dengan kompensasi yang ditingkatkan akan berdampak pada keuntungan meningkat, sementara seorang prinsipal berharap dapat mengurangi biaya melalui keuntungan yang lebih rendah. Perbedaan kepentingan ini dapat mempengaruhi perlakuan perusahaan terhadap agresivitas pajak (Zemzem & Ftouhi, 2013).

Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance*

Pimpinan berfokus pada tujuan organisasi sedangkan manajer berfokus pada cara pencapaian tujuan. Menurut tanggung jawab dan pimpinan perusahaan, terdapat dua karakteristik pada eksekutif ialah *risk taker* dengan *risk averse*. *Risk taker* merupakan sifat pimpinan dari entitas yang lebih berani dalam pengambilan putusan beresiko akan bisnis, pendapatan, status, otoritas lebih tinggi serta kekayaan (MacCrimmon & Wehrung, 1990). Sementara itu, eksekutif yang *risk averse* condong kepada putusan yang minim risiko. Pimpinan dengan *risk taker* condong melakukan *tax avoidance* dari pada pemimpin dengan *risk averse*. Berdasarkan argumen tersebut, hipotesis yang dapat dibuat, yakni:

H1 : Karakter eksekutif berpengaruh secara positif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Dalam penelitian sebelumnya, beberapa karakteristik perusahaan telah dipelajari, seperti ukuran, ukuran ekonomi yang dihasilkan melalui operasi luar negeri, dan faktor-faktor lain yang menjadi penentu *tax avoidance* (S. D. Dyreng et al., 2008). Penelitian ini memilih ukuran, *leverage* dan likuiditas dari karakteristik perusahaan.

Perusahaan besar terdapat sumber daya dan sarana untuk memanipulasi pajaknya (Crabbe, 2010). Penelitian sebelumnya tentang subjek tidak menghasilkan temuan yang konsisten (Nomura, 2017). Beberapa peneliti mengidentifikasi hubungan positif, sementara yang lain mengidentifikasi hubungan negatif. Selain itu, tingkat hutang yang tinggi dapat sangat mempengaruhi perilaku perpajakan perusahaan (Pratama, 2017). Jika biaya bunga dapat dikurangkan untuk tujuan pajak, maka ETR perusahaan dengan *leverage* tinggi akan sangat rendah (Gupta & Newberry, 1997).

Akhirnya, perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan akan mengadopsi strategi *tax avoidance* dan atau memiliki insentif untuk mengadopsi strategi perpajakan jangka pendek untuk meningkatkan likuiditas (Saavedra, 2014). Penelitian sebelumnya tentang hubungan antara ETR dan likuiditas masih terbatas. Berdasarkan argumen tersebut, hipotesis yang dapat dibuat, yakni:

H2 : Ukuran perusahaan berpengaruh secara positif terhadap *tax avoidance*

H3 : *Leverage* berpengaruh secara negatif terhadap *tax avoidance*.

H4 : Likuiditas berpengaruh secara positif terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan atas institusional adalah pemerintah, lembaga asing, badan hukum, dan lembaga lainnya yang memiliki kepemilikan saham. Badan tersebut memiliki kewenangan untuk mengawasi manajemen dan kinerja manajemen, seiring dengan meningkatnya kepemilikan perusahaan di badan tersebut, kepatuhan dan tingkat manajemen dapat meningkat (Ngadiman & Puspitasari, 2017). Penelitian dari Khurana & Moser (2009) menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan institusional mempengaruhi seberapa besar tindakan *tax avoidance* perusahaan. Kepemilikan institusional yang bersifat pasif dapat meningkatkan tindakan *tax avoidance*. Hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya kepemilikan saham institusional akan meningkatkan perilaku penghindaran pajak perusahaan, karena pasifnya kepemilikan institusional dapat membuat manajer lebih bebas dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan argumen tersebut hipotesis yang dapat dibuat, yakni:

H5 : Kepemilikan institusional berpengaruh secara positif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax Avoidance*

Semakin besar rasio kepemilikan manajerial maka konsentrasi kepemilikan perusahaan semakin lemah serta tata kelola jadi lebih baik. Oleh sebab itu, banyaknya insentif, mereka mulai memperhatikan kebijakan yang strategis pada perusahaan dan memiliki motivasi untuk mengontrol pekerjaannya. Perusahaan yang struktur kepemilikan menggunakan terdesentralisasi tidak terdapat masalah dalam hal profitabilitas. Untuk memperoleh keuntungan yang maksimal, motivasi manajemen membuat strategi perpajakan diterapkan dengan berani. Oleh karena itu, seiring dengan meningkatnya kepemilikan pengelola perusahaan maka proporsi tindakan *tax avoidance* perusahaan akan menurun (Timothy, 2010). Berdasarkan argumen tersebut, hipotesis yang dapat dibuat, yakni:

H6 : Kepemilikan manajerial berpengaruh secara positif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris memiliki urutan setelah pemegang saham. Dewan Komisaris adalah dewan yang bertanggung jawab atas monitoring dan penelaahan atas kinerja pada manajer, serta memastikan perusahaan beroperasi dengan baik, dan melindungi kepentingan pemegang saham. Komisaris independen mampu merencanakan atas strategi jangka panjang yang digunakan perusahaan, mengkaji implementasi strategi, serta mengurangi *tax avoidance*. Berdasarkan argumen tersebut, hipotesis yang dapat dibuat, yakni :

H7 : Dewan komisaris independen berpengaruh secara negatif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Dewan Direksi Terhadap *Tax Avoidance*

Semakin banyak dewan direksi, semakin baik pengawasannya. Semakin baik pengawasan dewan direksi, semakin sedikit perilaku curang yang dilakukan manajemen perusahaan, dan semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Dewan direksi memiliki kekuasaan untuk membuat kebijakan perusahaan. Menurut penelitian terdahulu, dewan direksi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Menurut Erlina et al. (2017),

dewan direksi memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan argumen tersebut, hipotesis yang dapat dibuat, yakni:

H8: Dewan direksi berpengaruh secara negatif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit adalah komite yang terdiri dari dewan komisaris. Komite audit diketuai oleh komisaris independen, dan anggotanya terdiri dari komisaris dan atau profesional dari luar perusahaan. Dengan dibentuknya komite audit dapat membuat peningkatan kinerja pada independensi auditor. Sehingga mengakibatkan peningkatan kesulitan dalam melakukan tindakan kolusi oleh manajemen serta auditor, akibatnya praktik *tax avoidance* dapat menurun. Berdasarkan argumen tersebut, hipotesis yang dapat dibuat, yakni :

H9 : Komite audit berpengaruh secara negatif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Rapat Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik, komite audit berperan penting, yaitu membantu dewan komisaris dalam meningkatkan kualitas dan pelaporan keuangan perusahaan, serta meningkatkan efektivitas audit internal dan eksternal perusahaan. Frekuensi rapat komite audit dapat menentukan apakah *good corporate governance* dalam suatu perusahaan dapat dianggap kuat atau tidak (Dhaliwal et al., 2006). Menurut Reza (2012) frekuensi rapat komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan argumen tersebut, hipotesis yang dapat dibuat, yakni :

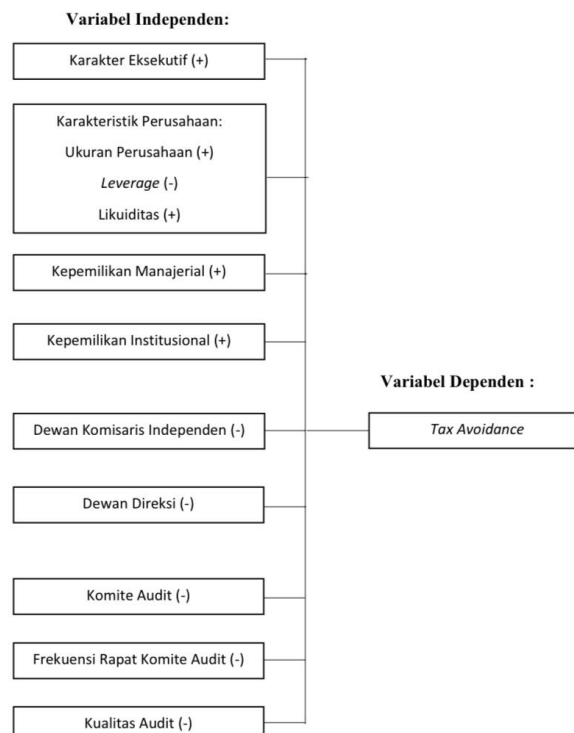
H10 : Frekuensi rapat komite audit berpengaruh secara negatif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Semakin besar perusahaan maka semakin kompleks akun dalam laporan keuangan, oleh karena itu diperlukan auditor independen yang berkualitas untuk melakukan audit (Watts & Zimmerman, 1990). Kantor Akuntan Publik dapat digunakan sebagai proksi untuk mengukur kualitas audit. Kantor akuntan publik yang tergabung dalam The Big Four lebih dapat diandalkan dan dapat mengontrol praktik *tax avoidance* suatu perusahaan. Penelitian sebelumnya telah menghasilkan hasil yang berbeda tentang pengaruh kualitas audit dan penghindaran pajak. Misalnya, Crabbe (2010) menemukan relasi negatif antara ETR dan kualitas audit, sedangkan peneliti lain, seperti Pratama (2017) menyimpulkan bahwa ada relasi positif. Berdasarkan argumen tersebut, hipotesis yang dapat dibuat, yakni:

H11 : Kualitas audit berpengaruh secara negatif terhadap *tax avoidance*.

**Gambar 1
Kerangka Pemikiran**



METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yang akan digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Variabel tersebut adalah variabel dependen dan variabel independen.

Variabel Dependen

Tax avoidance di penelitian ini pengukurannya melalui pemanfaatan ETR (*Effective Tax Rate*) sebagai proksi. Perhitungan ETR dilakukan dengan pembagian antara beban atau utang pajak yang harus dilunasi suatu entitas pada saat itu dengan laba atau profit sebelum pajak suatu entitas pada saat itu juga. Berikut rumusan perhitungan variabel dependen:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Variabel Independen

Ada sembilan variabel bebas dan salah satunya ada yang terbagi menjadi tiga bagian. Variabel independen dalam penelitian ini adalah sebelas dan akan dijabarkan detailnya berikut ini :

Karakter Eksekutif

Karakteristik eksekutif dalam pengukurannya menggunakan risiko yang ada dalam entitas. Pengukuran dari risiko perusahaan sendiri dapat diukur dengan menggunakan standar deviasi. Risiko perusahaan diperoleh dengan pembagian antara EBITDA (*Earning before interest, Depreciation dan Amortization*) dengan total atau keseluruhan dari aset yang dimiliki perusahaan. Karakter eksekusi merupakan variabel *dummy*. Jika risiko perusahaan lebih besar dari risiko rata-rata perusahaan sampel maka akan diberikan nilai 1 yang artinya merupakan *risk taker*. Dan jika risiko perusahaan kecil dan merupakan risiko rata-rata dari perusahaan sampel, maka akan diberikan nilai 0 yang artinya pemimpin *risk averse*.

$$\text{Risiko Perusahaan} = \frac{\text{EBITDA}}{\text{Total Aset}}$$

Karakteristik Perusahaan

Di dalam penelitian ini karakteristik perusahaan dibagi menjadi tiga indikator yang akan dijelaskan detail :

Ukuran Perusahaan

Pada suatu entitas yang mempunyai total aset dengan nilai besar akan menunjukkan potensi manajer untuk melakukan *tax avoidance* yang lebih besar lagi kedepannya.

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln Total Aset.}$$

Leverage

Semakin besar beban bunga akan mengakibatkan semakin besarnya pengurangan pada beban pajak, maka entitas tersebut secara tidak sengaja atau pun sengaja melakukan *tax avoidance*. Berikut adalah cara perhitungannya

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Kewajiban Jangka Panjang}}{\text{Total Aset Perusahaan}}$$

Likuiditas

Tingginya tingkat hutang dalam jangka pendek entitas, menandakan tingginya kemungkinan tindakan *tax avoidance*. Berikut adalah cara penghitungannya:

$$\text{Likuiditas} = \frac{\text{Total Aset Lancar}}{\text{Total Kewajiban Lancar}}$$

Kepemilikan Institusional

Jika rasio kepemilikan saham institusional besar, maka kemungkinan perusahaan akan lebih menghindari atau mengurangi tindakan *tax avoidance*. Berikut adalah cara penghitungannya.

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Saham Kepemilikan Institusional}}{\text{Saham yang Beredar}}$$

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajemen, pengukurannya dengan melakukan pembagian antara rasio saham manajemen dan keseluruhan saham yang diterbitkan. Jika suatu entitas mempunyai rasio kepemilikan atas saham manajerial yang besar, maka kemungkinan entitas tersebut akan lebih menghindari atau mengurangi tindakan *tax avoidance*.

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Saham Kepemilikan Manajerial}}{\text{Saham yang Beredar}}$$

Dewan Komisaris Independen

Variabel ini menjadi aspek esensial pemenuhan terkait dengan *good corporate governance* perusahaan. Perhitungan dewan komisaris independen bisa direpresentasikan dengan merekalkulasi keseluruhan komisaris independen dan jumlah dewan komisaris sebagai faktor pembagi.

$$\text{Dewan Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}}$$

Dewan Direksi

Dewan direksi pada dapat diperhitungkan dengan memastikan adanya penjumlahan atas seluruh keanggotaan dewan direksi suatu perusahaan.

Komite Audit

Variabel ini dapat diperhitungkan dengan memastikan adanya penjumlahan atas seluruh keanggotaan komite audit suatu entitas.

Rapat Komite Audit

Variabel penelitian ini dapat diperhitungkan dengan memastikan adanya penjumlahan atas hasil total rapat yang telah dilaksanakan oleh komite audit setiap tahunan kinerja.

Kualitas Audit

Variabel penelitian ini diposisikan selaku variabel *dummy*. Jika perusahaan sampel diaudit oleh KAP *The Big Four* akan diberi nilai 1 dan akan diberikan nilai 0 jika sebaliknya.

Populasi dan Sampel

Populasi membahas mengenai makna atas objek dari sisi keseluruhan yang secara detail diteliti pada penelitian. Pada dasarnya fungsi dasar suatu populasi dilihat berdasarkan keseluruhan perusahaan yang bersektor manufaktur dan *listing* pada Bursa Efek Indonesia bertahun 2018-2019.

Sampel merupakan sebuah bagian terkait populasi yang diteliti pada penelitian. Sampel ini dipilih dengan memanfaatkan teknik *purposive sampling*. Hal ini ialah metode memilih sampel yang didasari oleh standar atau kriteria dalam ketentuan peneliti (Sekaran & Bougie, 2010). Kriteria-kriteria dan standar dalam ketentuan peneliti dijabarkan sebagai berikut :

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum 31 Desember 2018 dan tidak *delisted* selama periode 31 Desember 2018 hingga 31 Desember 2019.
2. Perusahaan menerbitkan laporan keuangannya pada periode 31 Desember 2018 - 31 Desember 2019.
3. Perusahaan memiliki data yang dibutuhkan dalam penelitian, antara lain ETR, EBITDA, total aset, kewajiban jangka panjang, kewajiban lancar, aset lancar, persentase kepemilikan atas institusional, persentase kepemilikan manajerial, persentase dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit, rapat komite audit, dan kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan perusahaan selama periode 2018-2019.
4. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan yang dinyatakan dalam bentuk rupiah.
5. Perusahaan memiliki laba sebelum dan sesudah pajak yang positif selama periode 2018—2019.
6. Perusahaan memiliki nilai ETR di atas 0.

Metode Analisis

Model regresi pada penelitian ini menyesuaikan dengan variabel independen maupun variabel dependen yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut:

$$\text{ETR} = b_0 + b_1\text{RISK} + b_2\text{SIZE} + b_3\text{LEV} + b_4\text{LIK} + b_5\text{KINS} + b_6\text{KM} + b_7\text{IND} + b_8\text{DIR} + b_9\text{AUCOM} + b_{10}\text{MEET} + b_{11}\text{QUA} + e$$

Keterangan:

- ETR : *Effective Tax Rate*
- b0 : konstanta
- b1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 : koefisien
- RISK : karakter eksekutif
- SIZE : ukuran perusahaan
- LEV : *leverage*
- LIK : likuiditas
- KINS : kepemilikan institusional
- KM : kepemilikan manajerial
- INDP : dewan komisaris independen
- DIR : dewan direksi
- AUCOM : komite audit
- MEET : frekuensi rapat komite audit
- QUA : kualitas audit
- e : *error term*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi sampel penelitian

Berdasarkan metode *purposive sampling* yang dilakukan, ditemukan 56 perusahaan sektor manufaktur sebagai sampel pada penelitian ini dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 1
Rincian Sampel Penelitian

No.	Keterangan	2018	2019
1.	Total Perusahaan dari Sektor Manufaktur Yang <i>listing</i> di BEI.	174	195
2.	Total Perusahaan dari Sektor manufaktur yang tidak tepat dari kriteria yang sudah ditentukan.	(119)	(139)
3.	Data Outlier.	(4)	(5)
4.	Jumlah Perusahaan.	52	51
5.	Total Sampel Perusahaan		103

Sumber: Data sekunder, diolah 2021

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan dan memberikan informasi terkait gambaran deskripsi sampel atau populasi serta melihat data dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, *range*, *kurtosis*, dan *skewness* (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2016). Berikut hasil dari uji analisis statistik deskriptif :

Tabel 2
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	103	18.16	48.33	26.0130	5.25522
RISK	103	0	1	.34	.476
SIZE	103	29.92	38.10	33.4423	1.68921
LEV	103	.00	.40	.0851	.09416
LIK	103	.65	10.09	2.1027	1.36528
KINS	103	.00	.97	.6376	.24447
KM	103	.00	.75	.0806	.16103

KIND	103	.29	.80	.4130	.10777
DIR	103	2	11	5.52	2.292
AUCOM	103	3	5	3.10	.357
MEET	103	0	45	6.89	7.453
QUA	103	0	1	.33	.473
Valid N (listwise)	103				

Sumber: Data sekunder, diolah 2021

Pada tabel 4.2 memperjelas seluruh variabel dalam pengamatan. Variabel *tax avoidance* atas keseluruhan sampel, nilai maksimum beserta minimumnya ialah 48,33 serta 18,16. Untuk deviasi standar beserta nilai rata-rata ETR ialah 5,25522 dan 26,030.

Variabel karakter eksekutif nilai minimumnya adalah 0 serta nilai maksimumnya yaitu 1. Akan tetapi bagi nilai rata-rata serta deviasi standar dari risiko perusahaan ialah 0,34 dan 0,476.

Berikutnya adalah nilai minimum serta maksimum dari variabel yaitu 29,92 dan 38,10. Untuk nilai rata-rata dan deviasi standar yaitu 33,4423 dan 1,68921.

Kemudian *leverage* nilai minimum serta maksimum dari variabel yaitu 0 dan 0,40. Untuk nilai rata-rata dan deviasi standar yaitu 0,0852 dan 0,09416.

Variabel likuiditas nilai minimum serta maksimum dari variabel yaitu 0,65 dan 10,09. Untuk nilai rata-rata dan deviasi standar yaitu 2,1027 dan 1,36528.

Variabel kepemilikan institusional nilai minimum dan maksimum dari variabel yaitu 0 dan 0,97. Untuk nilai rata-rata dan deviasi standar yaitu 0,6376 dan 0,24447.

Variabel kepemilikan manajerial nilai minimum dan maksimum dari variabel yaitu 0 dan 0,75. Sedangkan nilai dari rata-rata beserta deviasi standar yaitu 0,0806 dan 0,16103.

Variabel dewan atas komisaris yang independenn ilai minimum dan maksimum dari variabel yaitu 0,29 dan 0,80. Untuk nilai dari rata-rata serta deviasi standar variabel yaitu 0,4130 dan 0,10777.

Variabel dewan direksi nilai minimum dan maksimum dewan direksi yaitu 2 dan 11. Untuk nilai dari rata-rata serta deviasi standar yaitu 5,52 dan 2,292.

Variabel komite audit nilai minimum dan maksimum komite audit yaitu 3 dan 5. Sedangkan untuk nilai dari rata-rata serta deviasi standarnya yaitu 3,10 dan 0,357.

Variabel rapat atas komite audit nilai dari minimum serta maksimum rapat atas komite audit yaitu 0 dan 45. Untuk rata-rata dan deviasi standar yaitu 6,89 dan 7,453.

Variabel kualitas suatu audit nilai rata-rata serta deviasi standar yaitu 0,33 dan 0,473.

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil dari uji statistik F ditampilkan dalam *tax avoidance* melalui pengukuran ETR, dan nilai probabilitas yang dihasilkan adalah ,000 atau kurang dari signifikan ($000 < 0,05$). Adapun nilai yang diperoleh dari F_{hitung} adalah 3,151, hal ini akan memastikan bahwa nilainya lebih besar dari F_{tabel} , dan hasil perhitungannya adalah nilai 1,89 yang diperoleh dari (0,05) (11; 92). Hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini variabel independen.

Sisi lain, pengujian koefisien determinasi R^2 menggunakan pengukuran ETR dengan hasil nilai *adjusted R²* yaitu 0,188 yang juga hampir mendekati nilai satu (1). Nilai ,188 atau 18,8% menggambarkan variabel dependen yaitu *tax avoidance* dapat diterangkan oleh variabel independen.

Berikut adalah hasil daripada uji statistik t pada model regresi penelitian:

Tabel 3
Hasil Uji Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	76.520	16.754		4.567	.000
RISK	-1.218	1.074	-.110	-1.134	.260

SIZE	-1.386	.503	-.445	-2.758	.007
LEV	14.256	5.461	.255	2.610	.011
LIK	-.628	.363	-.163	-1.729	.087
KINS	-7.802	2.131	-.363	-3.662	.000
KM	-8.960	3.359	-.275	-2.667	.009
KIND	5.423	4.827	.111	1.123	.264
DIR	.068	.319	.030	.213	.832
AUCOM	-.425	1.411	-.029	-.301	.764
MEET	-.072	.070	-.102	-1.023	.309
QUA	3.792	1.432	.341	2.649	.010

Sumber: Data sekunder, diolah 2021

Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap *Tax avoidance*

Melalui **tabel 4** dapat disimpulkan bahwa variabel RISK memiliki nilai Sig. 0,260 dengan nilai t sebesar -1,218. Berdasarkan nilai yang diperoleh maka dapat dijelaskan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Pada **tabel 4** nilai Sig. sebesar 0,260. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Sig. > 0,05. Maka hipotesis ditolak karena nilai Sig. > 0,05.

Penelitian ini memastikan bahwa karakter eksekutif memiliki hubungan positif terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan ETR. Apabila di dalam suatu eksekutif memiliki sifat risk taker maka yang terjadi adalah ETR akan berada dalam kondisi yang semakin kecil, dengan semakin kecilnya nilai suatu ETR memberikan indikasi tingginya peningkatan terhadap penghindaran pajak. Dari penjelasan diatas kesimpulan yang dapat diambil adalah peningkatan risk taker pada suatu eksekutif akan membuat semakin beraninya suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan praktik *tax avoidance*. Hasil penelitian ini memastikan memberikan dukungan terhadap penelitian yang dilakukan oleh S. Dyreng et al. (2011).

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance*

Melalui **tabel 4** menggambarkan bahwa variabel SIZE memiliki nilai Sig. 0,007 dengan nilai t sebesar -1,386. Sehingga nilai yang didapatkan menjelaskan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Pada **tabel 4** nilai Sig. sebesar 0,007. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Sig. < 0,05. maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan negatif signifikan terhadap ETR yang menjadi proksi *tax avoidance*. Hal ini mengartikan bahwa ketika semakin besarnya suatu ukuran perusahaan maka yang terjadi terdapat penurunan nilai ETR, kecilnya nilai suatu ETR perusahaan dapat dipastikan bahwa tingkat penghindaran pajak bagi perusahaan akan tinggi. Dengan tata kelola perusahaan yang baik maupun ukuran perusahaan yang besar mampu memberikan perhatian khusus terhadap suatu perpajakan sehingga *tax planning* perusahaan akan menjadi optimal dan terjadinya percepatan dalam ketercapaian *tax saving* bagi perusahaan. Dengan demikian pengelolaan perusahaan yang baik mampu meningkatkan atas penghindar pajak dan untuk perusahaan pajak yang akan dibayarkan memiliki nominal yang lebih kecil dan menjadikan besaran tarif pajak efektif bagi perusahaan relatif lebih kecil (Surbakti, 2012).

Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax avoidance*

Berdasarkan **tabel 4** dapat disimpulkan bahwa variabel LEV memiliki nilai Sig. 0,011 dengan nilai t sebesar 14.256. Berdasarkan nilai yang didapatkan maka dapat dijelaskan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Pada **tabel 4** nilai Sig. sebesar 0,011. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Sig. < 0,05. maka dapat disimpulkan bahwa *leverage* memiliki hubungan positif signifikan terhadap ETR yang menjadi proksi *tax avoidance*. Hal ini mengartikan bahwa semakin besarnya suatu *leverage* maka nilai ETR yang menjadi semakin besar, semakin besarnya nilai ETR perusahaan dapat dipastikan bahwa tingkat penghindaran pajak perusahaan akan rendah.

Utang yang dilakukan oleh perusahaan akan menjadi kendala besar yang berujung pada peningkatan aspek bunga atas hutang yang dilakukan dan efek yang dihasilkan adalah beban pajak terutang perusahaan yang semakin kecil. Banyak perusahaan yang beranggapan bahwa utang hanya sebagai alat transaksi dalam melakukan penghindaran atas pajak yang akan diterima oleh suatu perusahaan. Analoginya adalah ketika didalam suatu perusahaan semakin memperluas penggunaan hutang sebagai alternatif dalam kepastian sumber pendanaan, maka nilai pada ETR akan mengalami peningkatan secara signifikan. Peningkatan pada nilai ETR menjadi indikasi atas rendahnya perusahaan dalam melaksanakan penghindaran pajak.

Pengaruh Likuiditas Terhadap *Tax avoidance*

Melalui **tabel 4** menggambarkan bahwa variabel LIK memiliki nilai Sig. 0,087 dengan nilai t sebesar -0,624. Berdasarkan nilai yang didapatkan maka dapat dijelaskan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Pada **tabel 4** nilai Sig. sebesar 0,087. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Sig. > 0,05. maka dapat disimpulkan bahwa likuiditas memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap ETR yang menjadi proksi *tax avoidance*. Hal ini mengartikan bahwa ketika besarnya suatu likuiditas maka nilai ETR akan kecil, kecilnya nilai ETR dapat dipastikan bahwa tingkat penghindaran pajak akan tinggi.

Meskipun didalam suatu likuiditas perusahaan memastikan terjadinya yang menunjukkan hubungan secara negatif, akan tetapi penelitian ini tidak dapat melihat kecenderungan pengaruh di antara likuiditas dan *tax avoidance*. Tingkat likuiditas yang sama merupakan bentuk yang dapat menilai bahwa terdapat ketidakpastian maupun signifikansi atas penghindaran pajak suatu perusahaan. Hal ini dapat dibuktikan pada analisis deskriptif dimana nilai standar deviasi (1.36528) berada di bawah nilai rata-rata likuiditas (2.1027). Nilai standar deviasi yang lebih rendah dari nilai rata-rata mengindikasikan bahwa tingkat likuiditas perusahaan manufaktur hampir sama.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax avoidance*

Berdasarkan **tabel 4** dapat disimpulkan bahwa variabel KINS memiliki nilai Sig. 0,000 dengan nilai t sebesar -7,802. Berdasarkan nilai yang didapatkan maka dapat dijelaskan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Pada **tabel 4** nilai Sig. sebesar 0,000. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Sig. < 0,05. maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional memiliki hubungan negatif signifikan terhadap ETR yang menjadi proksi *tax avoidance*. Hal ini mengartikan bahwa semakin besarnya kepemilikan institusional maka nilai ETR semakin kecil, kecilnya nilai ETR dapat dipastikan bahwa tingkat penghindaran pajak akan tinggi.

Perusahaan sebenarnya dapat mengurangi setiap masalah yang timbul karena *agency problem* dengan memastikan bahwa beban pajak yang dimiliki perusahaan dikontrol dan dikelola melalui meminimalisir *tax avoidance* dengan mengambil peran secara utuh oleh kepemilikan institusional. Hal tersebut dilakukan demi mencapai salah satu tujuan perusahaan yaitu tercapainya suatu keuntungan yang bersifat *bottom line performance* dan adanya berkelanjutan dalam suatu investasi sehingga mencapai puncak peningkatan secara signifikan ke depannya. Selain itu, ketika kepemilikan institusional suatu perusahaan memiliki karakter pasif dalam keberjalanannya maupun fungsi pengawasannya, maka dapat dipastikan bahwa terdapat keterbukaan ruang bagi para manajemen perusahaan untuk melaksanakan kegiatan penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax avoidance*

Berdasarkan **tabel 4** dapat disimpulkan bahwa variabel KM memiliki nilai Sig. 0,009 dengan nilai t sebesar -8,960. Berdasarkan nilai yang didapatkan maka dapat dijelaskan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Pada **tabel 4** nilai Sig. sebesar 0,009. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Sig. < 0,05. maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki hubungan negatif signifikan terhadap ETR yang menjadi proksi *tax avoidance*. Hal ini mengartikan bahwa semakin besarnya kepemilikan manajerial maka ETRnya kecil, semakin kecilnya ETR dipastikan bahwa tingkat penghindaran pajak akan tinggi.

Salah satu pengaruh yang bisa meningkatkan aktivitas penghindaran pajak adalah dengan memberikan bonus ataupun insentif kepada para manajemen. Hal tersebut dilakukan dengan maksud melakukan efisiensi anggaran terhadap laba tinggi yang telah diperoleh. Setidaknya dengan bonus yang diberikan mampu meningkatkan sisi kinerja dari kepemilikan manajemen, dan tentunya

kondisi tersebut yang akan membuat para manajer lebih memiliki banyak kebebasan dalam melakukan agenda-agenda diantara adalah penghindaran pajak.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax avoidance*

Berdasarkan **tabel 4** dapat disimpulkan bahwa variabel KIND memiliki nilai Sig. 0,264 dengan nilai t sebesar 5,423. Berdasarkan nilai yang didapatkan maka dapat dijelaskan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Pada **tabel 4** nilai Sig. sebesar 0,264. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Sig. > 0,05. maka dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen memiliki hubungan positif dan tidak signifikan terhadap ETR yang menjadi proksi *tax avoidance*. Hal ini mengartikan bahwa ketika semakin besarnya suatu dewan komisaris independen maka yang terjadi terdapat peningkatan nilai ETR yang menjadi semakin besar, apabila semakin besarnya nilai suatu ETR perusahaan dapat dipastikan bahwa tingkat penghindaran pajak bagi perusahaan akan mengalami penurunan.

Penelitian ini menunjukkan hubungan negatif antara dewan komisaris independen dan *tax avoidance*, yang artinya semakin banyak jumlah komisaris independen maka semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan kinerja manajemen. Pengawasan ini dapat mengurangi masalah agensi atau *agency conflict* yang timbul seperti sikap oportunistik manajemen terhadap bonus, sehingga manajemen yang berkepentingan untuk mengurangi pembayaran pajak atau *tax avoidance* untuk memaksimalkan bonus yang diterima manajemen. Selain itu pengawasan yang semakin besar, mengakibatkan manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga *tax avoidance* dapat diminimalkan. Akan tetapi penelitian ini belum bisa menunjukkan hubungan yang signifikan antara dewan komisaris independen karena, tidak semua anggota Dewan Komisaris Independen dapat menunjukkan independensinya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan *tax avoidance*.

Pengaruh Dewan Direksi Terhadap *Tax avoidance*

Berdasarkan **tabel 4** dapat disimpulkan bahwa variabel DIR memiliki nilai Sig. 0,832 dengan nilai t sebesar 0,068. Berdasarkan nilai yang didapatkan maka dapat dijelaskan bahwa dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Pada **tabel 4** nilai Sig. sebesar 0,832. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Sig. > 0,05. maka dapat disimpulkan bahwa dewan direksi memiliki hubungan positif dan tidak signifikan terhadap ETR yang menjadi proksi *tax avoidance*. Hal ini mengartikan bahwa semakin besarnya dewan direksi maka ETR akan besar, semakin besarnya ETR dapat dipastikan bahwa tingkat penghindaran pajak akan rendah.

Dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penyebabnya karena entitas mempertimbangkan indikator lain yang terkait atas sanksi pidana atau administrasi dalam hal memutuskan penghindaran pajak. Dampak yang ditimbulkan berupa sanksi atau penalti dari fiskus, harga saham entitas turun, citra entitas yang rusak. Entitas akan memikirkan akibat sebelum melakukan penghindaran pajak dan membuat perencanaan pajak, jika perencanaan tidak dilakukan dengan baik dan benar maka akan menjerumuskan entitas ke dalam masalah hukum. Oleh karena itu hal tersebut sebelum melakukan penghindaran pajak dapat mempengaruhi keputusan. Tingkat tinggi rendahnya dewan direksi dalam entitas bukanlah menjadi faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*.

Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax avoidance*

Berdasarkan **tabel 4** dapat disimpulkan bahwa variabel AUCOM memiliki nilai Sig. 0,764 dengan nilai t sebesar -0,425. Berdasarkan nilai yang didapatkan maka dapat dijelaskan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Pada **tabel 4** nilai Sig. sebesar 0,764. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Sig. > 0,05. maka dapat disimpulkan bahwa komite audit memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap ETR yang menjadi proksi *tax avoidance*. Hal ini mengartikan bahwa semakin besarnya komite audit maka ETRnya rendah, semakin kecilnya ETR dipastikan bahwa tingkat penghindaran pajak bagi perusahaan akan tinggi.

Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian yang tidak signifikan ini disebabkan karena banyaknya komite audit yang hanya sekedar melakukan tugas - tugas rutin seperti penelaahan laporan dan seleksi auditor eksternal. Mereka juga tidak mempertanyakan secara kritis ataupun menganalisis secara mendalam kondisi pengendalian

pelaksanaan tanggung jawab oleh manajemen. Penyebabnya dimungkinkan bukan hanya karena kurangnya kompetensi dan independensi yang memadai, melainkan juga karena banyak dari mereka yang belum memahami peran utamanya.

Pengaruh Rapat Komite Audit Terhadap *Tax avoidance*

Berdasarkan **tabel 4** dapat disimpulkan bahwa variabel MEET memiliki nilai Sig. 0,309 dengan nilai t sebesar -0,072. Berdasarkan nilai yang didapatkan maka dapat dijelaskan bahwa rapat komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Pada **tabel 4** nilai Sig. sebesar 0,309. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Sig. > 0,05. maka penulis menarik kesimpulan bahwa rapat komite audit memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap ETR yang menjadi proksi *tax avoidance*. Hal ini mengartikan bahwa semakin besarnya suatu rapat komite audit maka ETRnya rendah, semakin kecilnya ETR dapat dipastikan bahwa tingkat penghindaran pajak akan semakin tinggi.

Pengaruh rapat komite atas audit terhadap *tax avoidance* tidak berpengaruh secara signifikan. Alasan pengujian mencerminkan hasil tidak signifikan yakni karena keputusan – keputusan terkait nominal pajak didominasi oleh pengelola perusahaan yang paham terkait masalah pajak perusahaan, sedangkan komite audit lebih mengarah kepengawasan dan pemberian saran ke dewan komisaris. Sehingga tingkat tinggi rendahnya rapat komite atas audit tidak mempengaruhi penghindaran pajak karena rapat komite atas audit tidak memiliki atau tidak diberi wewenang dalam hal tersebut.

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap *Tax avoidance*

Berdasarkan **tabel 4** dapat disimpulkan bahwa variabel QUA memiliki nilai Sig. 0,010 dengan nilai t sebesar 3.792. Berdasarkan nilai yang didapatkan maka dapat dijelaskan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Pada **tabel 4** nilai Sig. sebesar 0,011. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai Sig. < 0,05. maka penulis menyimpulkan kualitas audit memiliki hubungan positif signifikan kepada ETR yang menjadi proksi *tax avoidance*. Hal ini mengartikan bahwa semakin besarnya kualitas audit maka ETRnya tinggi, semakin tingginya ETR dapat dipastikan bahwa tingkat penghindaran pajak akan rendah.

Kualitas audit dipengaruhi oleh kompetensi seorang auditor. Entitas yang diaudit *The Big Four* telah terbukti tidak adanya *tax avoidance*, dapat disimpulkan bahwa auditor pada KAP ini lebih berkompeten dan memiliki profesionalitas yang lebih tinggi dari pada auditor KAP lainnya. Hal ini dikarenakan, keluasan pengetahuan serta pengalaman yang tinggi, sehingga auditor pada KAP ini lebih paham dalam mendeteksi kegiatan manipulasi pada laporan keuangan entitas dan juga dapat mengurangi kesempatan manajemen dalam melakukan *tax avoidance*.

KESIMPULAN

Kajian ini dilaksanakan dalam rangka memahami kaitannya antara GCG dan *tax avoidance*. Pada penelitian ini GCG diwakilkan memakai variabel seperti: karakter eksekutif, ukuran perusahaan, *leverage*, likuiditas, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit, rapat komite audit, dan kualitas audit. Sampel yang dipakai pada penelitian ini dengan jumlah 103 perusahaan manufaktur yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2019. Saat menetapkan sampel penelitian memakai metode *purposive sampling*, dimana sampel ditentukan sesuai kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya terkait analisis data penelitian, penelitian ini menggunakan statistik *multiple regression analysis* dan memperoleh hasil analisis bahwa hipotesis 2, 3, 5, 6 dan 11 terdapatnya hubungan yang signifikan sehingga hipotesis tersebut diterima. Sedangkan untuk hipotesis 1, 4, 7, 8, 9 dan 10 ditolak dikarenakan tidak adanya hubungan yang signifikan.

Adapun beberapa keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini diantaranya adalah hasil dari *Adjusted R-Square* dari pengaruh masing-masing variabel terhadap nilai *tax avoidance* sebesar 18,8% sedangkan nilai sebesar 81,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Selain itu penelitian ini hanya fokus pada perusahaan bersektor manufaktur sehingga tidak dapat menjelaskan pada sektor lainnya.

Evaluasi keterbatasan dari penelitian ini memberikan rekomendasi ataupun saran untuk penelitian selanjutnya yaitu menambah atau meningkatkan variabel lainnya, memperlebar cakupan dari sampel yang digunakan baik itu sektor lain atau meningkatkan rentang waktunya

dan diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi lain baik itu GAAP ETR atau pun lainnya.

REFERENSI

- Crabbe, K. (2010). The Impact of the Auditor and Tax Advice on the Effective Tax Rate. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1740408>
- Dhaliwal, D., Heitzman, S., & Li, O. Z. (2006). Taxes, leverage, and the cost of equity capital. *Journal of Accounting Research*, 44(4), 691–723. <https://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2006.00214.x>
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-run corporate tax avoidance. *Accounting Review*, 83(1), 61–82. <https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61>
- Dyreng, S., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2011). The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1158060>
- Erlina, N., Djefris, D., Eliyanora, E., Septriani, Y., & Lailaturrahmi, L. (2017). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur dan Pertambangan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2016). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 20(2), 210–229.
- Fadhilah, R. (2014). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011). *Jurnal Universitas Negeri Padang*, 2(1), 1–22. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/908/658>
- Gupta, S., & Newberry, K. (1997). Determinants of the Variability in Corporate Effective Tax Rates: Evidence from Longitudinal Data. *Journal of Accounting and Public Policy*, 16(1), 1–34.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. In *Corporate Governance: Values, Ethics and Leadership* (pp. 77–132). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.2139/ssrn.94043>
- Khurana, I. K., & Moser, W. J. (2009). Institutional Ownership and Tax Aggressiveness. *SSRN Electronic Journal*, 573, 0–42. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1464106>
- MacCrimmon, K. R., & Wehrung, D. A. (1990). Characteristics of Risk Taking Executives. *Management Science*, 36(4), 422–435. <https://doi.org/10.1287/mnsc.36.4.422>
- Ngadiman, & Puspitasari, C. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 408–421. <https://doi.org/10.24912/ja.v18i3.273>
- Nomura, H. (2017). What Determines Japanese Corporate Effective Tax Rates? Evidence from Firms Listed on the Tokyo Stock Exchange. *KEA-APEA 2017 Conference*.
- Pratama, A. (2017). Company Characteristics, Corporate Governance and Aggressive Tax Avoidance Practice: A Study of Indonesian Companies. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 6(4), 2304–1013.
- R.A. Supriyono. (2018). *Akuntansi Keperilakuan*.
- Reza, A. (2012). Analisis Kontribusi dan Efektivitas ANALISIS KONTRIBUTSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA. *Accounthink : Journal of Accounting and Finance*, 2(01), 1–26.
- Saavedra, D. (2014). Analysis of Unsuccessful Tax Avoiders. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2486917>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2010). *RESEARCH Methods for Business: A Skill-Building Approach*. (5th ed.). John Wiley & Sons, Ltd, 2013.
- Simanjutak, T. H., & Mukhlis, I. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam*

- Pembangunan Ekonomi* (p. 226).
- Smith, A. (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*.
- Surbakti, T. A. V. (2012). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010. *Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*, 1–93.
- Timothy, Y. C. K. (2010). Effects Of Corporate Governance On Tax Avoidance. *Hong Kong Baptist University*, 8(April), 8–37.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1990). Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective. *The Accounting Review*, 65(1), 131–156.
- Winarsih, Rina, Prasetyono, & Kusufi, M. S. (2014). *Pengaruh Good Corporate Government dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tindakan Pajak Agresif. Simposium Nasional Akuntansi XVII. Mataram.*
- Zemzem, A., & Ftouhi, K. (2013). The Effects of Board of Directors ' Characteristics on Tax Aggressiveness. *Research Journal in Finance and Accounting*, 4(4), 140–148.